

Spending Review

Kebijakan Efisiensi Anggaran Universitas Andalas 2024–2026: Dari Pengendalian Belanja Menuju Efisiensi Struktural

Oleh
Hefrizal Handra

Efisiensi anggaran di Universitas Andalas (UNAND) telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2024, bukan kebijakan yang baru muncul pada 2025, ketika pemerintah melakukan efisiensi belanja secara nasional. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UNAND menunjukkan bahwa berbagai instrumen pengendalian dan efisiensi belanja telah diterapkan sejak penyusunan RKAT 2024. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan pada 2025, diperkuat melalui Surat Edaran Rektor Nomor 1 Tahun 2025, dan selanjutnya diintegrasikan secara lebih sistematis ke dalam Pedoman Penyusunan RKAT 2026. Dengan demikian, periode 2024–2026 memperlihatkan evolusi kebijakan dari pengendalian belanja, menuju penghematan yang lebih intensif, dan kemudian menuju pelembagaan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Efisiensi Dimulai dalam RKAT 2024

Pedoman Penyusunan RKAT UNAND Tahun 2024 secara eksplisit menetapkan arah kebijakan untuk “mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja Fakultas/Unit.” Kebijakan ini diterjemahkan ke dalam sejumlah instrumen pengendalian belanja yang cukup konkret. Salah satu yang paling terukur adalah pembatasan anggaran perjalanan dinas untuk keperluan operasional manajemen Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran (UKPA). Untuk Fakultas/Unit dengan pagu kurang dari Rp6 miliar, perjalanan dinas dibatasi maksimal 6 persen dari pagu; unit dengan pagu Rp6 miliar sampai kurang dari Rp12 miliar maksimal 5 persen; sedangkan unit dengan pagu Rp12 miliar atau lebih maksimal 4 persen. Penganggaran yang melebihi batas tersebut hanya dapat dilakukan dengan permohonan kepada Rektor disertai alasan yang dapat diterima.

Kebijakan efisiensi 2024 tidak terbatas pada perjalanan dinas. Pedoman juga meminta pengurangan pencetakan backdrop dan spanduk untuk rapat, seminar, kuliah umum, wisuda, dan kegiatan lain di dalam kampus dengan mengoptimalkan penggunaan LCD proyektor. Penyediaan makanan dan snack harus disesuaikan dengan perkiraan kehadiran peserta. Pengadaan pakaian dinas dibatasi paling banyak satu stel per orang per tahun dan pengadaan pakaian untuk kegiatan khusus memerlukan izin Rektor.

Efisiensi juga ditempuh melalui perubahan mekanisme pengadaan. Beberapa kegiatan pengadaan dilakukan secara terpusat di Rektorat, sehingga fakultas tidak lagi melaksanakan sendiri. ATK di lingkungan Rektorat juga diadakan secara terpusat melalui UKPA Bidang II menggunakan mekanisme e-purchasing melalui e-katalog. Bahkan pengadaan barang/jasa, baik barang modal maupun bahan habis pakai pada unit-unit di lingkungan Rektorat, dikonsolidasikan melalui UKPA Bidang II berdasarkan usulan kebutuhan masing-masing unit.

Dengan demikian, kebijakan 2024 sebenarnya telah menggunakan beberapa pendekatan efisiensi sekaligus, yaitu pembatasan pagu, pengendalian volume, standardisasi biaya, digital substitution, e-purchasing, dan sentralisasi pengadaan tertentu. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa 2024 bukan sekadar tahun sebelum kebijakan efisiensi, melainkan dapat dipandang sebagai tahun awal atau baseline pelembagaan pengendalian efisiensi belanja UNAND.

Tahun 2025: Kelanjutan Kebijakan dan Intensifikasi Penghematan

Pedoman Penyusunan RKAT 2025 pada dasarnya melanjutkan berbagai instrumen yang telah diperkenalkan pada 2024. Batas perjalanan dinas 6 persen, 5 persen, dan 4 persen tetap dipertahankan. Demikian pula pengurangan backdrop dan spanduk, penyesuaian konsumsi dengan jumlah peserta, pembatasan pakaian dinas, sentralisasi jaket mahasiswa baru, e-purchasing ATK, serta sentralisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Rektorat.

Namun, terjadi perubahan penting pada awal 2025. Pada 11 Februari 2025 diterbitkan Surat Edaran Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi/Penghematan Belanja dalam Pelaksanaan RKAT Universitas Andalas Tahun 2025. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus berkaitan dengan berkurangnya alokasi BP PTNBH dan EQUITY yang diterima UNAND.

Surat Edaran tersebut mengubah intensitas kebijakan efisiensi. Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran (UKPA) di lingkungan Rektorat, Bidang I, Bidang II, Bidang III, Bidang IV, Sekretariat Universitas, LPPM, LPM, diminta melakukan reviu terhadap RKAT 2025 sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Lebih jauh lagi, UKPA tersebut diminta melakukan efisiensi/penghematan pagu RKAT 2025 minimal sebesar 30 persen dari alokasi pagu anggarannya. Penting dicatat bahwa ketentuan minimum 30 persen tersebut dalam dokumen yang tersedia secara spesifik ditujukan kepada UKPA di lingkungan Rektorat. Karena itu, angka 30 persen tidak diperlakukan sebagai pemotongan seragam terhadap seluruh RKAT UNAND, termasuk seluruh fakultas dan unit lainnya. Perbedaan ini penting dalam melakukan spending review agar pengukuran dampak kebijakan tidak menghasilkan kesimpulan yang berlebihan.

Efisiensi 2025 juga tidak semata-mata dilakukan melalui pemotongan pagu. Perjalanan dinas diminta dibatasi dengan tetap memedomani ketentuan perjalanan dinas dan standar biaya UNAND. PPK Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktual dan Pejabat Pengadaan diminta menunda proses pemesanan/pengadaan barang atau peralatan inventaris baru. UKPA terlebih dahulu harus memanfaatkan peralatan inventaris yang tersedia dan masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. Pengadaan peralatan yang penting dengan spesifikasi khusus tetap dimungkinkan, tetapi harus memperoleh izin tertulis dari Rektor. Kebijakan ini memperlihatkan dimensi efisiensi yang berbeda dari sekadar *budget cutting*. Pemanfaatan kembali aset yang telah tersedia menghasilkan *cost avoidance*, yaitu menghindari pengeluaran baru tanpa harus mengurangi pelayanan. Sementara itu, pengendalian perjalanan dinas dan standar biaya menghasilkan penghematan melalui pengurangan volume maupun unit cost.

Hal penting lainnya adalah bahwa Surat Edaran tersebut mengecualikan kegiatan prioritas atau rutin operasional dari revisi yang dimaksud. Untuk kegiatan rutin operasional, penyesuaian dapat

dilakukan dengan mengurangi volume atau standar harga. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlangsungan fungsi universitas: efisiensi dilakukan tanpa mengabaikan kegiatan yang dipandang prioritas dan kebutuhan rutin penyelenggaraan universitas.

Tahun 2026: Menuju Efisiensi yang Lebih Struktural

Jika kebijakan Februari 2025 dapat dipandang sebagian sebagai respons terhadap tekanan anggaran, perkembangan yang lebih penting justru terlihat dalam Pedoman Penyusunan RKAT 2026. Pedoman tersebut secara eksplisit menyebut implementasi Surat Edaran Rektor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi/Penghematan Belanja sebagai salah satu tujuan penyusunan RKAT 2026. Dengan demikian, beberapa prinsip efisiensi yang diperkuat pada 2025 mulai dibawa masuk ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Pedoman RKAT 2026 tetap mempertahankan pembatasan perjalanan dinas 6 persen, 5 persen, dan 4 persen berdasarkan besarnya pagu unit. Namun cakupan pengendalian diperjelas. Pelaksanaan lembur harus memperhatikan urgensi dan kebutuhan yang benar-benar mendesak. Konsumsi operasional, konsumsi lembur, dan konsumsi rapat internal diminta mempertimbangkan efektivitas dan manfaatnya, sedangkan makanan dan snack kegiatan harus menyesuaikan perkiraan kehadiran peserta. Kebijakan pengurangan percetakan backdrop dan spanduk tetap dipertahankan. Sementara itu terdapat penguatan yang sangat jelas pada pengadaan pakaian dinas. Jika pada 2024 dan 2025 pakaian dinas masih diperbolehkan maksimal satu stel per tahun, pengadaan pakaian dinas pada 2026 ditiadakan.

Pedoman 2026 juga semakin jelas menempatkan efisiensi dalam kerangka *value for money*. Pada arah kebijakan Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset disebutkan bahwa prinsip *value for money* diterapkan dalam penyusunan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal. Fakultas juga diarahkan untuk melakukan efisiensi belanja di samping meningkatkan penerimaan non-APBN. Perubahan tersebut penting. Orientasi efisiensi mulai bergeser dari sekadar “berapa anggaran yang dapat dikurangi” menuju pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu “bagaimana kebutuhan universitas dapat dipenuhi dengan biaya yang lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar.”

Evolusi Kebijakan Efisiensi 2024–2026

Secara keseluruhan, perkembangan kebijakan tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

Instrumen	2024	2025	2026
Batas perjalanan dinas	6%–5%–4%	6%–5%–4% pembatasan tambahan	+ 6%–5%–4%
Pengendalian konsumsi	Ada	Ada	Diperkuat
Pengurangan percetakan/backdrop	Ada	Ada	Ada
Pakaian dinas	Maks. 1 stel	Maks. 1 stel	Ditiadakan
ATK Rektorat	Terpusat/e-purchasing	Terpusat/e-purchasing	Terpusat/e-purchasing
Pengadaan barang/jasa Rektorat	Dikonsolidasikan	Dikonsolidasikan	Pengendalian berlanjut
Pemanfaatan aset yang tersedia	—	Diperkuat melalui SE	Menjadi bagian semangat efisiensi
Penundaan pengadaan baru	—	Ada	—*
Penghematan minimum 30% UKPA Rektorat	—	Ada melalui SE	—*
Pengendalian lembur	Belum eksplisit dalam bagian yang ditelaah	—	Eksplisit
Value for money	Belum eksplisit	Belum menonjol	Eksplisit

*Pedoman 2026 mengimplementasikan semangat SE Rektor No. 1/2025, tetapi dari dokumen yang ditelaah tidak tepat diasumsikan bahwa kewajiban pemotongan minimum 30 persen atau seluruh ketentuan temporer 2025 otomatis diberlakukan kembali dengan besaran yang sama pada 2026.

Dari Efisiensi Administratif Menuju Efisiensi Struktural

Dari rangkaian kebijakan tersebut terlihat bahwa perjalanan efisiensi UNAND selama 2024–2026 dapat dibagi ke dalam tiga fase. Tahun 2024 merupakan fase pengendalian dan pelembagaan awal, ketika berbagai batas dan mekanisme efisiensi dimasukkan dalam Pedoman RKAT. Tahun 2025 merupakan fase intensifikasi penghematan, ketika tekanan terhadap sumber pendanaan mendorong dilakukannya review anggaran dan penghematan yang lebih besar, terutama pada UKPA di lingkungan Rektorat. Tahun 2026 merupakan fase pelembagaan lebih lanjut, ketika prinsip-prinsip efisiensi tahun sebelumnya dibawa ke dalam proses penyusunan RKAT dan mulai ditempatkan dalam kerangka *value for money*.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan efisiensi UNAND seharusnya tidak hanya diukur dari berapa besar penurunan belanja. Pengurangan anggaran belum tentu merupakan efisiensi apabila terjadi karena kegiatan tidak terlaksana. Sebaliknya, penggunaan kembali aset yang masih layak, konsolidasi pengadaan, digitalisasi menggantikan percetakan, pengurangan unit cost, atau pengurangan perjalanan tanpa mengurangi fungsi universitas merupakan bentuk efisiensi yang lebih substantif.

Karena itu, *spending review* RKAT UNAND 2024–2026 selanjutnya perlu menguji apakah evolusi kebijakan tersebut benar-benar tercermin dalam struktur dan realisasi belanja. Analisis perlu memisahkan penghematan akibat perubahan kebijakan dari sekadar rendahnya penyerapan anggaran, serta melihat apakah penghematan pada belanja administratif dan penunjang memberikan ruang untuk mempertahankan atau memperkuat belanja yang langsung mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan mahasiswa, dan prioritas strategis universitas.

Dengan pendekatan tersebut, *spending review* tidak hanya akan menghasilkan angka mengenai berapa rupiah yang berhasil dihemat, tetapi dapat menjawab pertanyaan yang lebih penting: dari mana efisiensi tersebut berasal, kebijakan apa yang paling efektif menghasilkan penghematan, apakah efisiensi tersebut berkelanjutan, dan apakah kualitas layanan serta pencapaian tujuan utama universitas tetap dapat dipertahankan.

Dampak Kebijakan Efisiensi terhadap Belanja Universitas Andalas 2024–2026

Setelah menelaah kebijakan efisiensi dalam Pedoman Penyusunan RKAT UNAND 2024, 2025, Pedoman RKAT 2026, serta Surat Edaran Rektor Nomor 1 Tahun 2025, tahap berikutnya adalah melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar tercermin dalam perubahan pola belanja Universitas Andalas. Analisis awal berikut menggunakan tiga kelompok data yang telah tersedia, yaitu data perjalanan dinas, utilities dan beberapa jenis jasa, serta bahan habis pakai dan beberapa belanja operasional. Sumber data masing-masing adalah dari data realisasi menurut jenis belanja tahun 2024, 2025 dan 2026. Catatan, angka realisasi tahun 2026 dalam seluruh analisis berikut adalah realisasi sampai dengan 31 Juli 2026, bukan realisasi setahun penuh. Oleh sebab itu, realisasi 2026 tidak dibandingkan secara langsung dengan realisasi setahun penuh 2024 atau 2025 untuk menyimpulkan besarnya penghematan tahunan.

1. Gambaran Umum Dampak Efisiensi

Untuk melihat arah perubahan secara umum, jenis belanja yang tersedia dalam data dikelompokkan menjadi empat kelompok: perjalanan dinas; utilities dan langganan; bahan habis pakai dan operasional; serta kelompok belanja lainnya.

Tabel 1. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Kelompok Belanja UNAND 2024–2026

(Rp miliar)

Kelompok Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Anggaran 2026	Realisasi s.d. 31 Jul 2026
Perjalanan dinas	44,34	23,81	30,89	17,82	32,88	5,27
Utilities & langganan*	31,13	26,34	29,30	27,75	29,88	12,58
Bahan habis pakai & operasional**	56,85	42,31	50,65	39,20	41,70	10,26
Belanja lainnya***	62,99	49,17	58,45	47,73	63,60	16,01

* Listrik, telepon, air, bandwidth internet, software, serta langganan daya dan jasa lainnya.

** Bahan habis pakai perkantoran, kerumahtanggaan, bahan habis pakai lainnya, persediaan perkantoran serta BBM dan pelumas.

*** Berdasarkan akun lain yang sementara tersedia dalam data: media massa, iklan/promosi, jasa narasumber, sewa, iuran, sertifikasi, pendaftaran kegiatan serta pemeliharaan.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dampak kebijakan efisiensi tidak seragam. Perjalanan dinas dan bahan habis pakai menunjukkan penurunan pagu yang sangat jelas, sedangkan *utilities* relatif lebih rigid. Kelompok lainnya bahkan meningkat kembali pada 2026 karena di dalamnya terdapat beberapa jenis pengeluaran yang bukan merupakan target utama penghematan, terutama pemeliharaan gedung. Temuan tersebut penting: kebijakan efisiensi UNAND tampaknya tidak bekerja sebagai *across-the-board spending cut*. Penghematan lebih terkonsentrasi pada jenis belanja tertentu yang mempunyai ruang diskresi lebih besar.

2. Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas merupakan jenis belanja yang paling jelas menjadi sasaran kebijakan efisiensi UNAND. Sejak Pedoman RKAT 2024, belanja perjalanan dinas operasional manajemen UKPA sudah dibatasi maksimal 6 persen untuk unit dengan pagu kurang dari Rp6 miliar, 5 persen untuk unit dengan pagu Rp6–<Rp12 miliar, dan 4 persen untuk unit dengan pagu Rp12 miliar atau lebih. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat pada Februari 2025. Surat Edaran Rektor Nomor 1 Tahun 2025 secara khusus meminta pejabat pengelola anggaran untuk membatasi kegiatan perjalanan dinas sebagai bagian dari program efisiensi/penghematan RKAT 2025. Data memperlihatkan dampak yang cukup kuat.

Tabel 2. Belanja Perjalanan Dinas UNAND 2024–2026 (Rp miliar)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Realisasi
2024	44,34	23,81	53,7%
2025	30,89	17,82	57,7%
2026	32,88	5,27*	16,0%*

*sampai dengan 31 Juli 2026.

Anggaran perjalanan dinas turun dari Rp44,34 miliar pada 2024 menjadi Rp30,89 miliar pada 2025, atau berkurang Rp13,45 miliar (30,3 persen). Realisasinya juga turun dari Rp23,81 miliar menjadi Rp17,82 miliar, atau turun sekitar Rp5,99 miliar (25,1 persen). Pada 2026 pagu perjalanan dinas meningkat sedikit menjadi Rp32,88 miliar dibandingkan 2025. Namun angka tersebut masih Rp11,46 miliar atau 25,8 persen lebih rendah dibandingkan pagu 2024. Sampai dengan 31 Juli 2026, realisasinya baru Rp5,27 miliar atau 16,0 persen dari pagu.

Secara lebih rinci, pengurangan terjadi pada hampir seluruh jenis perjalanan. Salah satu yang terbesar adalah perjalanan dinas manajemen luar kota luar provinsi, yang anggarannya turun dari sekitar Rp15,47 miliar pada 2024 menjadi Rp10,88 miliar pada 2025 dan Rp10,84 miliar pada 2026. Perjalanan dinas non-manajemen luar kota luar provinsi juga turun dari Rp13,96 miliar pada 2024 menjadi Rp9,84 miliar pada 2025 dan Rp10,04 miliar pada 2026.

Dengan demikian, perjalanan dinas merupakan salah satu kelompok yang paling jelas menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi telah memengaruhi struktur pagu, bukan sekadar menghasilkan realisasi yang rendah. Pengurangan sekitar 30 persen pada pagu 2025 juga sangat konsisten dengan intensifikasi kebijakan efisiensi yang terjadi pada tahun tersebut.

3. Efisiensi Belanja Utilities dan Langganan

Efisiensi utilities memiliki karakter berbeda dari perjalanan dinas. Listrik, air, telepon dan jaringan internet merupakan kebutuhan dasar operasional universitas sehingga ruang penghematannya lebih terbatas. Penurunan belanja utilities karena gangguan layanan tentu tidak dapat disebut sebagai efisiensi. Meskipun demikian, data memperlihatkan terdapat upaya menekan beberapa komponen utilities.

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Utilities dan Langganan UNAND (Rp miliar)

Jenis Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Anggaran 2026	Real. s.d. Jul 2026
Listrik	13,50	10,81	11,01	10,91	9,91	6,26
Telepon	0,50	0,44	0,45	0,36	0,40	0,18
Air	0,88	0,88	0,84	0,82	0,71	0,23
Bandwidth internet	6,20	6,20	7,03	6,91	6,70	1,67
Langganan software	1,87	0,69	1,19	0,66	1,84	0,32
Daya dan jasa lainnya	8,18	7,33	8,78	8,10	10,32	3,92
Total	31,13	26,34	29,30	27,75	29,88	12,58

Pagu utilities secara keseluruhan turun dari Rp31,13 miliar pada 2024 menjadi Rp29,30 miliar pada 2025, atau sekitar **5,9 persen**. Pada 2026 pagunya kembali sedikit meningkat menjadi Rp29,88 miliar, tetapi masih sekitar 4,0 persen di bawah 2024.

Temuan yang paling menarik adalah **listrik**. Pagu anggaran listrik turun secara konsisten: **Rp13,50 miliar → Rp11,01 miliar → Rp9,91 miliar**.

Dibandingkan dengan 2024, pagu listrik 2026 telah berkurang sekitar **Rp3,59 miliar atau 26,6 persen**. Namun realisasi 2025 sebesar Rp10,91 miliar justru sedikit lebih tinggi daripada realisasi 2024 sebesar Rp10,81 miliar. Artinya, penurunan pagu belum secara otomatis menghasilkan penghematan realisasi pada 2025. Terdapat tambahan penggunaan listrik di Fakultas tertentu karena tambahan gedung/ruang baru dan juga penambahan AC. Namun di beberapa titik, terjadi penghematan. Data realisasi biaya listrik ini termasuk di RS UNAND, yang juga mengalami peningkatan karena meningkatnya layanan.

Telepon menunjukkan pola yang lebih jelas. Pagu turun sekitar 10,5 persen pada 2025 dan secara kumulatif sekitar 19,0 persen dibandingkan 2024 pada 2026. Realisasi telepon 2025 juga turun sekitar 19,2 persen. Hal ini adalah dampak dari kebijakan untuk menutup *fixed line* di kampus UNAND. Air menunjukkan pola serupa: pagu 2026 sebesar Rp0,71 miliar, lebih rendah sekitar 19,7 persen dibandingkan 2024.

Namun bandwidth internet justru meningkat dibandingkan 2024. Hal ini tidak tepat langsung dinilai sebagai ketidakefisienan. Peningkatan bandwidth dapat menjadi konsekuensi digitalisasi layanan universitas. Pedoman 2026 sendiri mendorong transformasi digital dan integrasi layanan berbasis teknologi. Karena itu, spending review terhadap internet dan software harus mempertimbangkan kualitas dan cakupan layanan, bukan sekadar nilai rupiah. Dengan demikian, efisiensi utilities lebih tepat diarahkan pada *energy and resource efficiency*, terutama listrik, air dan telepon, sedangkan bandwidth dan software sebaiknya diperlakukan sebagai *enabling expenditure* bagi transformasi digital.

4. Efisiensi Belanja Barang Habis Pakai dan Operasional

Kelompok bahan habis pakai merupakan sasaran penting berikutnya. Sejak 2024, UNAND telah menggunakan e-purchasing/e-katalog untuk pengadaan ATK dan melakukan sentralisasi pengadaan ATK di lingkungan Rektorat. Kebijakan tersebut secara konseptual dapat menghasilkan efisiensi melalui konsolidasi kebutuhan, pengurangan duplikasi pembelian dan peningkatan daya tawar pengadaan.

Tabel 4. Belanja Bahan Habis Pakai dan Operasional UNAND (Rp miliar)

Jenis Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Anggaran 2026	Real. s.d. Jul 2026
BHP perkantoran	5,31	3,77	6,15	4,68	4,59	0,94
BHP kerumahtanggaan	29,68	21,51	26,30	19,27	22,74	5,17
BHP lainnya	11,27	7,79	9,79	8,05	6,34	1,38
Persediaan perkantoran	5,16	4,71	3,77	3,25	3,79	0,99
BBM dan pelumas	5,43	4,54	4,63	3,95	4,24	1,79
Total	56,85	42,31	50,65	39,20	41,70	10,26

Di antara empat kelompok yang dianalisis, bahan habis pakai menunjukkan pengurangan pagu yang sangat kuat dan berkelanjutan. Total pagu turun dari Rp56,85 miliar pada 2024 ke Rp50,65 miliar pada 2025 dan Rp41,70 miliar pada 2026. Dengan demikian, dibandingkan 2024, pagu kelompok ini pada 2026 telah turun sekitar Rp15,15 miliar atau 26,6 persen. Komponen terbesar, yaitu bahan habis pakai kerumahtanggaan, turun dari Rp29,68 miliar pada 2024 menjadi Rp26,30 miliar pada 2025 dan Rp22,74 miliar pada 2026. Penurunannya mencapai sekitar 23,4 persen dibandingkan 2024. Lebih tajam lagi terjadi pada bahan habis pakai lainnya. Pagu berkurang dari Rp11,27 miliar menjadi Rp6,34 miliar, sehingga dalam dua tahun terjadi pengurangan sekitar 43,7 persen. Persediaan perkantoran juga mengalami penurunan sekitar 26,5 persen dibandingkan 2024, sedangkan BBM dan pelumas berkurang sekitar 21,9 persen.

Dalam konteks kebijakan efisiensi UNAND, pola ini cukup kuat mengindikasikan terjadinya pengendalian terhadap kebutuhan operasional yang bersifat rutin. Namun untuk menyatakan seluruh pengurangan tersebut sebagai *efficiency saving*, nantinya tetap perlu diketahui apakah volume layanan pendidikan dan administrasi tetap dapat dipertahankan.

5. Efisiensi Belanja Lainnya

Kelompok terakhir lebih heterogen. Sebagian merupakan belanja yang relatif mudah dikendalikan, seperti media massa, promosi, sewa peralatan dan jasa narasumber. Sebagian lainnya, seperti sertifikasi dan pemeliharaan, justru dapat berhubungan langsung dengan kualitas dan fungsi utama universitas.

Tabel 5. Beberapa Jenis Belanja Lainnya yang Relevan dengan Efisiensi (Rp miliar)

Jenis Belanja	Anggaran 2024	Anggaran 2025	Perubahan 24–25	Anggaran 2026	Perubahan 24–26
Media massa	2,67	1,68	-37,1%	0,57	-78,5%
Iklan & promosi	0,84	0,80	-5,1%	0,50	-39,9%
Jasa profesi narasumber	8,24	6,93	-16,0%	7,57	-8,1%
Sewa kendaraan	4,13	3,65	-11,5%	3,91	-5,3%
Sewa peralatan penunjang	1,93	1,48	-23,4%	0,87	-55,0%
Pendaftaran kegiatan	8,22	6,49	-21,0%	7,59	-7,7%
Iuran/sertifikasi/penghargaan lainnya	3,50	2,23	-36,3%	2,23	-36,2%
Pemeliharaan jaringan	1,86	0,89	-52,1%	0,56	-69,7%
Pemeliharaan gedung	27,82	29,80	+7,1%	33,37	+20,0%

Beberapa penurunan sangat konsisten dengan kebijakan efisiensi. Media massa misalnya turun dari Rp2,67 miliar pada 2024 menjadi hanya Rp0,57 miliar pada 2026, atau sekitar 78,5 persen. Sewa peralatan penunjang turun sekitar 55 persen. Penurunan media/promosi juga dapat dikaitkan dengan kebijakan UNAND sejak 2024 untuk mengurangi backdrop/spanduk dan menggunakan sarana digital yang tersedia. Sebaliknya, terdapat belanja yang tidak seharusnya diperlakukan sebagai target penghematan secara mekanis. Pemeliharaan gedung dan bangunan justru meningkat dari Rp27,82 miliar pada 2024 menjadi Rp29,80 miliar pada 2025 dan Rp33,37 miliar pada 2026.

Kenaikan belanja pemeliharaan tersebut tidak dengan sendirinya bertentangan dengan kebijakan efisiensi. Menunda pemeliharaan yang memang diperlukan dapat menciptakan *maintenance backlog* dan biaya yang lebih besar pada masa depan. Karena itu, spending review harus membedakan *discretionary administrative spending* dari *asset-preserving expenditure*. Demikian pula kenaikan anggaran sertifikasi profesional atau iuran tertentu perlu dinilai dengan melihat hubungan belanja tersebut dengan indikator kinerja universitas.

6. Temuan Awal Spending Review

Dari data yang tersedia, terdapat indikasi cukup kuat bahwa kebijakan efisiensi UNAND sejak 2024, dan terutama setelah intensifikasi kebijakan pada 2025, telah mengubah struktur beberapa kelompok belanja.

Tabel 6. Besarnya Perubahan Pagu Belanja

Kelompok	Perubahan 2024→2025	Perubahan 2024→2026	Interpretasi Awal
Perjalanan dinas	-30,3%	-25,8%	Efisiensi sangat kuat
Utilities & langganan	-5,9%	-4,0%	Relatif rigid; efisiensi terutama listrik/air/telepon
Bahan habis pakai & operasional	-10,9%	-26,6%	Efisiensi kuat dan semakin struktural
Belanja lainnya	-7,2%	+1,0%	Heterogen; perlu analisis per akun

Dua temuan utama menonjol. Pertama, perjalanan dinas merupakan bentuk efisiensi paling nyata pada 2025. Penurunan pagu 30,3 persen dan realisasi 25,1 persen dibandingkan 2024 memperlihatkan bahwa pengendalian perjalanan bukan hanya tercantum dalam pedoman, tetapi terlihat dalam angka.

Kedua, bahan habis pakai menunjukkan indikasi efisiensi struktural yang bahkan semakin kuat pada 2026. Pagu 2026 sekitar 26,6 persen di bawah 2024. Hal ini berbeda dengan pemotongan sesaat: pengurangan terus dipertahankan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Untuk utilities, hasilnya lebih kompleks. Pagu listrik, air dan telepon turun cukup signifikan, tetapi kebutuhan bandwidth dan jasa langganan lainnya tetap besar. Karena itu efisiensi utilities sebaiknya tidak didefinisikan sebagai sekadar penurunan seluruh pengeluaran.

Sementara itu, kelompok “lain-lain” memperlihatkan mengapa *spending review* tidak boleh menggunakan pendekatan pemotongan seragam. Belanja media, promosi, sewa peralatan dan beberapa jasa turun tajam, tetapi belanja pemeliharaan gedung meningkat. Ini dapat menjadi indikasi bahwa ruang fiskal tidak hanya dihemat, tetapi sebagian juga dialihkan ke kebutuhan yang lebih substantif. Namun kesimpulan mengenai realokasi tersebut masih perlu diuji dengan data belanja yang lebih lengkap.

Kesimpulan Sementara

Secara keseluruhan, data awal mendukung argumen bahwa kebijakan efisiensi UNAND selama 2024–2026 telah menghasilkan perubahan yang cukup nyata dalam beberapa kategori belanja. Dampak terbesar terlihat pada perjalanan dinas dan bahan habis pakai, sedangkan pada utilities terjadi efisiensi yang lebih selektif. Beberapa jenis belanja administratif lainnya—seperti media massa, sewa peralatan, dan sebagian belanja promosi—juga mengalami pengurangan yang sangat besar.

Namun hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa efisiensi UNAND tidak semestinya diukur dari penurunan total belanja semata. Belanja yang berhubungan dengan pemeliharaan aset, digitalisasi, sertifikasi, dan kegiatan yang mendukung tridharma perlu dilihat berdasarkan manfaat dan output yang dihasilkannya.

Khusus 2026, realisasi Rp5,27 miliar perjalanan dinas, Rp12,58 miliar utilities, Rp10,26 miliar bahan habis pakai, dan Rp16,01 miliar kelompok lainnya adalah realisasi sampai dengan 31 Juli

2026. Karena itu angka tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan penurunan realisasi tahunan. Yang sudah dapat kita simpulkan dengan lebih kuat adalah bahwa struktur pagu 2026 menunjukkan sebagian besar pengendalian belanja yang dimulai pada 2024 dan diperkuat pada 2025 tetap dipertahankan, terutama pada perjalanan dinas dan bahan habis pakai.

Tahap berikutnya akan sangat menarik kalau kita tambahkan belanja pegawai/honorarium, rapat dan konsumsi, pakaian dinas, belanja modal/peralatan, serta keseluruhan belanja UNAND. Dengan itu kita akan dapat menghitung bukan hanya penghematan per kelompok, tetapi juga berapa besar proporsi belanja yang berhasil dialihkan dari belanja administratif menuju fungsi utama universitas.